



PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul,
D.I. Yogyakarta - 55187

Telp. 0274 - 4396 412 Fax. 0274 - 4396 415

website : <http://www.pt-yogyakarta.go.id>

Nomor : W13-U/877/BP/OT. 01.2/III/2023 Yogyakarta, 27 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Kepada Yth.

✓ Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Di

BANTUL

AGENDA NO: 550/UM/III/2023
TANGGAL: 29 MAR 2023

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bantul dimaksudkan untuk :
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
 - e. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Bantul memperoleh nilai sebesar **81,15** atau **A (Memuaskan)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	Perencanaan Kinerja	30		26,1
2	Pengukuran Kinerja	30		24,6
3	Pelaporan Kinerja	15		12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		18

Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,91	81,15
	BB (Sangat Baik)	A (Memuaskan)

No	Catatan
1. Perencanaan Kinerja	
a.	Target persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu 93% masih kurang menantang karena kendali penyampaian salinan putusan ada pada satker, harusnya berani target 100%
2. Pengukuran Kinerja	
a.	Eviden rapat monev hanya bulan April saja, dapat ditambahkan eviden Jadwal monev sesuai Rencana Aksi agar dapat diketahui berapa kali dilaksanakan monev tiap tahunnya.
3. Pelaporan Kinerja	
a.	Dokumen Laporan Kinerja belum direviu oleh tim Pereviu Laporan Kinerja (belum ada pernyataan telah direviu)
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
a.	Eviden belum memberikan informasi bukti dokumen Laporan hasil evaluasi internal pertriwulan, perbagian dan lengkap sesuai PK (target/realisasi/hambatan/rekomendasi)
b.	Eviden tidak memberikan informasi standar pelaksanaan pelaksanaan evaluasi kinerja internal misal Pedoman, SOP, Juknis
c.	Eviden SDM yang memadahi masih kurang sertifikat diklat SAKIP (baru 1 orang)
d.	Terdapat 1 target PK yang realisasinya 0%
No	Rekomendasi
1. Perencanaan Kinerja	
a.	Agar target indicator persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dapat dinaikkan.
2. Pengukuran Kinerja	
a.	Eviden b.1 agar dilengkapi rapat monev dan Jadwal monev sesuai rencana aksi
3. Pelaporan Kinerja	
a.	Eviden a.4 agar dilengkapi Pernyataan bahwa LKjIP telah direviu.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
a.	Dokumen Laporan hasil evaluasi internal agar dilengkapi
b.	Eviden b.1 agar dilengkapi Pedoman/SOP/Juknis pelaksanaan evaluasi kinerja internal.
c.	Eviden b.2 agar ditambahkan lagi sertifikat diklat/bimtek SAKIP

d.	Agar monev triwulan ditindaklanjuti dengan reuiu PKT jika ada realisasi dibawah target.
----	---

Demikian hasil evaluasi atas kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2022, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul. Pengadilan Negeri Bantul dapat menyampaikan Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2023. Terhadap satuan kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta



SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. d
NIP : 195804011984031004

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q Biro Perencanaan Dan Organisasi MA RI.